

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Syarafina Kautsar^a, Raisa Rafifiti Choerunnisa^{b*}

^{a,b} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a syarafinakautsar@gmail.com ^b raisa.rafifiti@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya emisi gas rumah kaca di Indonesia sebesar 18.665,52 ton CO₂e dan tingginya GRK di Provinsi Jawa Barat yang disebabkan oleh kepadatan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di ruang lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor hambatan dalam implementasi program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) serta memberikan rekomendasi berupa saran terkait pembaruan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Teknis dan Anggaran Program KBLBB. Penelitian ini menggunakan teori dari model implementasi Van Meter dan Van Horn yang meliputi dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan; Sumberdaya; Struktur Birokrasi; Komunikasi; Disposisi atau Sifat Para Pelaksana; Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih adanya kekurangan yang harus dioptimalkan dalam regulasi, infrastruktur, anggaran dan kesadaran OPD dilingkungan Provinsi Jawa Barat. Kendala yang ditemui dalam penelitian ini yaitu regulasi yang tidak memadai, kurangnya anggaran, kurangnya infrastruktur, dan minimnya kesadaran para pengguna.

Kata Kunci: Implementasi, Kendaraan Listrik, Baterai.

Implementation of The Battery-Based Electric Motorized Vehicle (KBLBB) Program at The Department of Energy and Mineral Resources West Java Province

Abstract

This research is motivated by the high greenhouse gas emissions in Indonesia amounting to 18,665.52 tons of CO₂e and the high GHG in West Java Province caused by population density. This research aims to analyze the implementation of the Battery-Based Electric Motor Vehicle (KBLBB) program in the scope of the West Java Provincial Government at the Department of Energy and Mineral Resources of West Java Province, in addition to identifying the obstacles in the implementation of the Battery-Based Electric Motor Vehicle (KBLBB) program) and provide recommendations in the form of suggestions related to the update of the Governor's Regulation Number 27 of 2018 regarding the Technical and Budget Program of KBLBB. This research uses the theory of Van Meter and Van Horn's implementation model which includes the Standard and Policy Target dimensions; Resources; Bureaucratic Structure; Communication; Disposition or Nature of Executors; Social, Economic and Political Environment. This research uses a qualitative approach with the method of data collection that is used, which is through interview, observation, and literature study. The results of this research show that there are still deficiencies that must be optimized in the regulation, infrastructure, budget and awareness of OPD in West Java Province. Obstacles found in this research are inadequate regulations, lack of budget, lack of infrastructure, and lack of awareness among users.

Keywords: *Implementation, Electric Vehicle, Battery.*

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi topik yang mendesak dan menarik perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Perubahan tersebut menyebabkan peningkatan suhu di berbagai belahan muka bumi, sehingga mengakibatkan perubahan cuaca di berbagai belahan dunia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim adalah emisi karbon yang merupakan pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon merupakan kontributor utama terhadap perubahan iklim global. Ancaman emisi karbon ini berpotensi berdampak secara tidak langsung terhadap kondisi lingkungan, kesehatan manusia, hingga stabilitas ekonomi suatu negara (Aditya, 2024). Hingga saat ini terdapat desakan bagi para negara di dunia untuk beralih menuju penggunaan sumber energi alternatif untuk mengurangi emisi karbon serta memastikan ketahanan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Sudjoko, 2021). Pemakaian energi konvensional yang terus menerus akan mengancam berbagai aspek, khususnya pada bidang energi dan lingkungan melalui emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Laporan yang dirilis oleh IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah mempercepat peningkatan kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi (Sudjoko, 2021). Akumulasi gas rumah kaca ini mengakibatkan penyerapan panas yang berlebihan di atmosfer yang kemudian menyebabkan panas suhu bumi meningkat. Akibat kejadian tersebut menyebabkan terjadinya perubahan iklim, sehingga perlu modifikasi pada pola iklim yang di induksi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia, yang mengubah komposisi atmosfer global serta mengenai variasi alami dalam iklim yang diamati selama rentang waktu tertentu, Sudjoko dalam (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2007). Menurut Perserikatan

Bangsa-bangsa Indonesia, emisi gas rumah kaca menyelimuti Bumi dan memerangkap panas matahari. Oleh karena itu berdampak terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Untuk saat ini, dunia mengalami pemanasan tercepat dalam sejarah. Pembuatan energi listrik dan panas dengan cara membakar bahan bakar fosil yang akan menghasilkan emisi global dalam jumlah besar. Sebagian besar energi listrik masih dihasilkan dengan membakar batu bara, minyak, atau gas. Pembakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida dan dinitrogen oksida yang akan menjadi gas rumah kaca berbahaya yang menyelimuti dan memerangkap panas matahari. Hanya sekitar seperempat dari energi listrik global yang dihasilkan dari angin, tenaga surya dan sumber daya terbarukan lainnya. Tidak seperti bahan bakar fosil, sumber daya terbarukan hanya sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, (Bangsa-bangsa, 2022). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dengan bahan bakar minyak di Indonesia telah mencapai angka 148.212.865 unit pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat sebesar 4,37% dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2022). Meskipun angka tersebut terus meningkat tiap tahunnya, Indonesia telah resmi memasukkan masalah tersebut kedalam pembahasan bersama *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) untuk dapat ditindaklanjuti melalui langkah strategis untuk mengurangi kebutuhan energi minyak bumi. Fenomena tersebut telah sejalan dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh beberapa negara yang berpartisipasi dalam agenda UNFCC, yang juga termasuk langkah konkret dalam mengurangi emisi karbon dioksida secara global. (Aditya,2024). Transportasi darat di jalan raya mengalami kemajuan seiring dengan pembangunan yang dilakukan dengan pesat. Hal ini tentunya menuntut proses pengawasan yang baik dan ketat terhadap

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dipenuhinya persyaratan laik jalan demi menjaminkannya keselamatan, keamanan, kelancaran dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasiannya.

Komitmen pemerintah untuk melakukan tindak lanjut tersebut dimulai dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional/Dinas Pemerintahan. Instruksi tersebut memuat langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh tiap organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Kebijakan tersebut secara implisit memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan tindakan migrasi pengadaan kendaraan bermotor bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam tingkat provinsi, telah termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kendaraan Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang dimana telah memasukan KBLBB sebagai kendaraan operasional di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat roda 4 dan roda 2. Peraturan tersebut secara rinci memasukkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penggunaan kendaraan operasional dinas tersebut ditekankan melalui pengadaan kendaraan roda 4 (empat) sebagai kendaraan operasional dinas pimpinan. Namun tahun 2024 pada pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Provinsi Jawa Barat terdapat faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

(KBLBB) di Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Anggaran
2. Minimnya Kesadaran dan Kebiasaan OPD
3. Minimnya Sarana dan Prasarana
4. Kurangnya regulasi

Selama penggunaan kendaraan operasional dinas yang diberikan terhadap masing-masing OPD, Dinas ESDM melakukan monitoring terkait penggunaan kendaraan KBLBB yang digunakan oleh para pimpinan kepala dinas. Berdasarkan statistik jumlah odometer yang berhasil direkam oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, terdapat jumlah data pemakaian yang fluktuatif dari angka odometer atau sebuah alat sebagai penunjuk jarak tempuh kendaraan yang direkam oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Fluktuasi angka odometer tersebut menjadi sebuah fenomena dikarenakan mobil yang telah disediakan tidak digunakan secara maksimal mendukung kegiatan sehari-hari oleh kepala dinas. Berdasarkan uraian fenomena dari masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka menjadi sebuah ketertarikan untuk meneliti lebih dalam, yang bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis implementasi program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti penelitian ini yaitu jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini melibatkan informan yang berperan penting dalam membantu penulis mengumpulkan informasi terkait topik

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

yang dibahas. Para informan memberikan kontribusi signifikan dalam proses penelitian dengan menyediakan data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik *purposive* yaitu penulis sudah memilih dan mempertimbangkan informan yang dianggap dapat mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang program KBLBB. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat yang dipertimbangkan mengetahui dan terlibat sebagai penggunaan tertinggi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat yang dipertimbangkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Analisis Program Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dipertimbangkan dapat memberikan informasi penjabaran proses penerapan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama Dinas Energi dan Sumber Daya Manineral Provinsi Jawa Barat dipertimbangkan dapat memberikan data sesuai dengan kondisi lapangan, dan Bidang Penganggaran Badan Penganggaran Keuangan Dan Aset Daerah Jawa Barat dipertimbangkan dapat bertanggungjawab dan mengetahui penganggaran dalam program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dokumen dari berbagai sumber yang berkaitan dengan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

C. PEMBAHASAN

Hasil dari analisis implementasi program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ini, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 dimensi yaitu Sasaran dan Standar kebijakan; Sumberdaya; Struktur Birokrasi; Komunikasi; Disposisi atau Sifat Para Pelaksana; dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Sehingga hasil penelitian yang didapat di lapangan sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Teori Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Standar ini berfungsi sebagai pedoman yang membantu dalam menentukan apakah tujuan kebijakan telah tercapai. Tanpa adanya sasaran yang terukur, sulit untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat pada saat penelitian di lapangan, bahwa Dinas ESDM Jawa Barat sedang berupaya untuk merumuskan sasaran yang jelas dalam kebijakan KBLBB berupa Roadmap, ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi implementasi kebijakan di masa depan. Standar dan sasaran yang jelas juga membantu dalam mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil. Dengan adanya indikator kinerja yang terukur, pemerintah dapat lebih mudah mengevaluasi efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Standar dan sasaran kebijakan yang jelas sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan KBLBB. Dengan adanya roadmap dan indikator kinerja yang terukur, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

2. Sumber daya

Sumber daya yang memadai, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya sarana prasarana sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan. Transportasi darat di jalan raya mengalami kemajuan seiring dengan pembangunan yang dilakukan dengan pesat. Hal ini tentunya menuntut proses pengawasan yang baik dan ketat terhadap dipenuhinya persyaratan laik jalan demi menjaminkannya keselamatan, keamanan, kelancaran dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasiannya (Setiawan et al., 2021). Teori Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa ketersediaan sumber daya yang cukup dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat pada saat penelitian di lapangan, bahwa kurangnya sumber daya anggaran juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, bahwa keterbatasan anggaran dapat membatasi pilihan skema yang dapat digunakan untuk implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari solusi yang dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia. Ketersediaan sumber daya yang memadai adalah faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan KBLBB. Dengan mengelola anggaran dengan baik, pemerintah dapat lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan ini.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien juga berperan penting dalam implementasi kebijakan. Teori Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa struktur birokrasi yang baik dapat memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. struktur birokrasi yang jelas dapat membantu dalam menghindari kebingungan dan memastikan bahwa semua pihak berkontribusi sesuai dengan peran mereka. Selain itu, struktur birokrasi yang efisien juga dapat mempercepat

proses pengambilan keputusan. Struktur birokrasi yang jelas dan efisien adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan KBLBB.



Gambar 1. Struktur Birokrasi Program KBLBB

Sumber: Dinas ESDM Jawa Barat (2023)

Pada gambar 1 disajikan berdasarkan data dan melalui wawancara yang di dapat pada saat penelitian di lapangan, yang dimaana pada struktur birokrasi di program KBLBB ini pihak ESDM Jawa Barat sebagai *leading sector* program dan berkerjasama dengan stakeholder lain yang mempunyai tugas masing-masing dalam program KBLBB ini. Maka dapat di simpulkan bahwa dalam struktur birokrasi pada program KBLBB sudah jelas dan efisien, dengan memiliki struktur yang baik, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan ini.

4. Komunikasi

Dalam proses pelaksanaan kebijakan, penting untuk menekankan kemampuan para pelaksana kebijakan dalam berkomunikasi secara efektif untuk mendukung implementasi kebijakan yang terkait (Choerunnisa & Rosinta, 2021; Nurparikha et al., 2023; Annisya & Novira, 2023; Novira & Suherman, 2023). Komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan (Afandi et al., 2023; Mursalim & Anwar, 2024). Teori Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa komunikasi yang baik dapat membantu dalam menyampaikan informasi, mengurangi kesalah pahaman,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dan membangun dukungan untuk kebijakan yang diimplementasikan.



Gambar 2. Aplikasi OSMOSYS
Sumber: Dinas ESDM Jawa Barat (2023)

Pada gambar 2 disajikan berdasarkan data dan melalui wawancara yang di dapat pada saat penelitian di lapangan, bahwa pihak ESDM Jawa Barat perihal komunikasi antara pelaksana program dengan pengguna program menggunakan aplikasi osmosys yang dimana setiap bulannya para OPD memasukan evaluasi seperti input km trip perjalanan kendaraan listrik untuk mejadi bahan evaluasi dan monitoring pihak ESDM Jawa Barat, setelah itu menjadi bahan laporan program setiap bulannya kepada pimpinan. Untuk saran, masukan dan keluhan pihak ESDM Jawa Barat pun membuat *whatsapp* grup yang di isi oleh para penggunaan, yang dimana *platform* tersebut untuk menyampaikan keluhan yang ada dan sebagai media sosialisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang ada di program KBLBB sangat efektif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, komunikasi dapat membantu menciptakan sinergi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Disposisi atau Sifat Para Pelaksana

Disposisi atau sifat para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa sikap positif dan komitmen dari para

pelaksana dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat pada saat penelitian di lapangan, bahwa sikap positif dari para pelaksana kebijakan dapat berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan KBLBB. Komitmen para *stakeholder* program KBLBB ini untuk mencapai tujuan menurunkan emisi karbon. Selain itu, disposisi juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan memiliki disposisi yang baik, para pelaksana kebijakan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Disposisi yang positif dan komitmen dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan KBLBB. Dengan sikap yang baik dan kemampuan untuk beradaptasi, para pelaksana dapat lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan ini.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

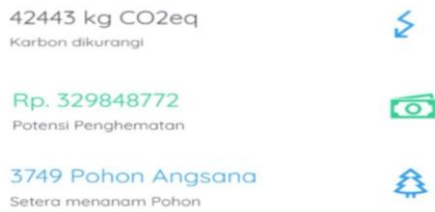
Lingkungan sosial mencakup norma, nilai, dan interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik (KBLBB) di lingkungan sosial berperan penting dalam menentukan penerimaan dan partisipasi terhadap program tersebut.

Aspek ekonomi dalam teori Van Meter dan Van Horn mencakup analisis biaya dan manfaat dari kebijakan yang diimplementasikan. Dalam konteks KBLBB, analisis ekonomi sangat penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG



Gambar 3. Evaluasi Program KBLBB
Sumber : Dinas ESDM Jawa Barat (2023)

Pada gambar 3 disajikan berdasarkan data dan melalui wawancara yang di dapat pada saat penelitian di lapangan, bahwa pada dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik pada program KBLBB memiliki manfaat dari aspek lingkungan. Sebagai bentuk partisipasi untuk menggerakkan kesadaran akan lingkungan dengan menurunkan emisi karbon menggunakan transportasi listrik. Dan evaluasi ekonomi menjadi salah satu indikator kinerja dalam program KBLBB. Dengan menghitung penghematan biaya operasional, pemerintah dapat menunjukkan manfaat ekonomi dari transisi ke kendaraan listrik.

Pada pembahasan dalam penelitian ini, penulis juga menemukan faktor penghambat dalam program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam sub bab ini akan dijelaskan terkait hasil analisa faktor penghambat pada implementasi program. Adapun hasil analisa kendala yang ditemukan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- **Regulasi dan kebijakan yang belum memadai**

Meskipun pemerintah telah memberikan beberapa insentif dan kebijakan pendukung, masih ada kendala regulasi yang harus diatasi. Ini termasuk kebutuhan untuk peraturan yang lebih jelas dan konsisten tentang insentif fiskal, standar teknis, serta kebijakan lingkungan yang mendukung penggunaan kendaraan listrik. Regulasi dan kebijakan yang belum memadai di Jawa Barat menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam

pengembangan dan adopsi kendaraan listrik.

- **Kurangnya Infrastruktur Pengisian Daya**

Infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian listrik (*charging station*), masih terbatas di Jawa Barat. Ketersediaan stasiun pengisian yang terbatas dapat menjadi hambatan bagi pengguna kendaraan listrik, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Tanpa infrastruktur yang memadai, para pengguna mungkin ragu untuk beralih ke kendaraan listrik karena khawatir tentang jangkauan kendaraan dan kemudahan pengisian daya.

- **Kurangnya anggaran**

Anggaran pemerintah merupakan faktor kunci dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik, termasuk pembangunan insentif untuk pembelian kendaraan, serta dukungan riset dan pengembangan (R&D). Di Jawa Barat, alokasi anggaran untuk proyek-proyek terkait kendaraan listrik masih sangat terbatas. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala anggaran yang disebabkan oleh pembatasan dana dari pemerintah pusat dan kurangnya pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, dalam alokasi anggaran, kendaraan listrik belum menjadi prioritas utama dibandingkan dengan isu-isu lain yang dianggap lebih mendesak.

- **Kurangnya kesadaran OPD di ruang lingkup Jawa Barat**

Tingkat kesadaran dan pemahaman tentang keuntungan dan operasional kendaraan listrik masih relatif rendah. Banyak pengguna atau penerima program mungkin tidak sepenuhnya mengerti manfaat kendaraan listrik, seperti biaya operasional yang lebih rendah dan dampak positif terhadap lingkungan.

Dapat dilihat bahwa beberapa hal penting sebagai implikasi adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

(KBLBB) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Dalam proses implementasi, pentingnya standar dan sasaran kebijakan yang jelas tidak dapat diabaikan dalam implementasi KBLBB. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sedang berupaya merumuskan roadmap yang memberikan arah yang jelas bagi implementasi kebijakan di masa depan. Dengan adanya standar dan sasaran yang terukur, pemerintah dapat lebih mudah mengevaluasi efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Indikator kinerja yang jelas juga membantu dalam mengidentifikasi hasil dari kebijakan yang diimplementasikan, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap dampak kebijakan tersebut. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai seperti anggaran yang cukup, dan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan program KBLBB. Pada struktur birokrasi yang efisien memungkinkan pemerintah untuk mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan ini dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa setiap pihak berkontribusi sesuai dengan peran mereka. Dengan adanya struktur yang baik, proses pengambilan keputusan dapat dipercepat, yang pada gilirannya mendukung implementasi kebijakan KBLBB secara keseluruhan. Selain itu, komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kunci untuk menyampaikan informasi, mengurangi kesalah pahaman, dan membangun dukungan untuk kebijakan yang diimplementasikan. Dan disposisi positif dari para pelaksana kebijakan, seperti komitmen untuk mendorong penggunaan

kendaraan listrik dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Dengan adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, politik menjadi salah satu indikator kinerja yang penting, di mana analisis biaya dan manfaat dari penggunaan kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil yang dapat menunjukkan penghematan biaya operasional yang signifikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi KBLBB tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari dampak ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan dari transisi ke kendaraan listrik.

2. Meskipun terdapat potensi besar dalam implementasi Program KBLBB, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan. Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya regulasi daerah yang ada, mengakibatkan terjadinya ketidak optimalan pada pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana pengisian daya listrik dan minimnya anggaran menjadi hambatan signifikan dalam implementasi KBLBB. Ketersediaan stasiun pengisian listrik yang terbatas di Jawa Barat dapat membuat para OPD ragu untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama untuk perjalanan dinas jarak jauh. Tanpa infrastruktur yang memadai, kekhawatiran tentang jangkauan kendaraan dan kemudahan pengisian daya dapat menghalangi untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kebiasaan para OPD di ruang lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengenai manfaat kendaraan listrik, yang dimana OPD

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya memahami keuntungan dari penggunaan kendaraan listrik, seperti biaya operasional yang lebih rendah dan dampak positif terhadap lingkungan.

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah diuraikan sebelumnya, saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yaitu:

1. Untuk Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk merekomendasikan perubahan regulasi, dengan menyarankan pembaruan pada peraturan gubernur no 27 tahun 2018 mengenai tentang teknis dan anggaran pada Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan segera penyusunan Roadmap pengembangan ekosistem KBLBB. Peneliti menyarankan sarana dan prasarana pengisian daya listrik untuk tersebar di titik wilayah-wilayah yang penting. Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik dan pencarian solusi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia juga sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara efektif.
2. Untuk OPD diruang lingkup Provinsi Jawa Barat agar diharapkan untuk mulai beradaptasi dan mulai terbiasa dengan kebiasaan baru terhadap penggunaan kendaraan listrik demi mendukung percepatan program KBLBB di Jawa Barat.
3. Untuk para peneliti yang fokus pada isu-isu lingkungan diharapkan untuk terus berusaha memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas kebijakan program kendaraan listrik. Serta diharapkan untuk berkontribusi dengan memberikan saran atau rekomendasi kebijakan kepada

lembaga terkait guna mendukung program kendaraan listrik.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dari implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan potensi besar dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan standar kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Meski begitu, beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur pengisian daya, minimnya anggaran, dan rendahnya kesadaran OPD mengenai manfaat kendaraan listrik masih menghambat pelaksanaan program.

Untuk memperbaiki implementasi program ini, penting bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera memperbarui regulasi dan menyusun roadmap yang jelas. Peningkatan infrastruktur, seperti memperbanyak stasiun pengisian daya di wilayah strategis, juga diperlukan. Selain itu, OPD di Provinsi Jawa Barat harus lebih terbuka terhadap penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung percepatan program KBLBB. Peneliti dan akademisi juga diharapkan terus berkontribusi dengan memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas implementasi program ini.

REFERENSI

- Aditya, A. P. (2024). Kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai .
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research, 10*(1).
<https://doi.org/10.1080/216650>

- 95.2023.2212868
- Annisya, N.M.O., Novira. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26 (1), 29-50. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>.
- Choerunnisa, R.R., Rosinta, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 429-438. <http://dx.doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762>
- Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat (2023). Implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai-KBLBB. Retrieved From https://esdm.jabarprov.go.id/desdm_jabar/books/pdf/KBLBB%202023.pdf
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional/Dinas Pemerintahan.
- Kurniawan, I., Setiawan, B., & Choerunnisa, R. R. (2019). Analisis Kepuasan Pengguna Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(2), 273-288. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.529>
- Mursalim, S. W., & Anwar, S. (2024). Institutional model of science techno Park: Overview of government-owned Stp management in West Java. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 43. doi:10.26858/jiap.v14i1.57033
- Novira, A., Suherman, N.P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), pp. 170 – 175.
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kendaraan Kerja Aparatur Pemerintah Daerah
- Setiawan, B., Choerunnisa, R.R., Widyastuti, C.I. (2021). Analisis Sistem Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital Dinas Perhubungan Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 5 (1), 7 – 13.
- Setiawan, B., Choerunnisa, R.R., Caswadi, C. (2022). Evaluasi pelayanan publik pada poli umum rsud kota bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6 (1), 102 -110.
- Sudjoko, C. (2021). Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai . *Jurnal Paradigma*.
- Taryono, O., Mursalim, S.W., Anwar, S. (2021). Strategy for Handling Covid-19 in the Perspectives of Policy Implementation, Community Institutions and Community Participation in Cileunyi Sub-District. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 140 – 145.
- Utami, dkk (2022). Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional 2022)